

Prabowo Undang Tokoh Senior TNI dalam Acara Focus Group Discussion

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh senior TNI dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin (10/1). Acara FGD itu mengambil tema tentang Lingkungan Strategis dan Kontijensi Ancaman.

Sejumlah tokoh yang hadir adalah sebagian dari mantan jenderal baret merah Kopassus, di antaranya AM Hendropriyono dan Agum Gumelar. Hadir juga mantan Panglima TNI ke-14 Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto. Sementara mantan Menko Polhukam ke-10 Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sucipto hadir secara virtual.

Prabowo mengatakan, tujuannya mengundang sejumlah tokoh itu untuk menggalang masukan bagi Kemhan dalam menghasilkan produk-produk strategis di bidang penyelenggaraan pertahanan negara.

"Kemhan mengundang tokoh senior TNI yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pertahanan negara," ujar Prabowo, Rabu (12/1).

Mantan Danjen Kopasus itu juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jenderal tersebut di Kementerian Pertahanan.

"Terima kasih atas kesediaan para senior untuk hadir meluangkan waktunya," tutur Prabowo. ● han

TNI AL Tangkap 3 Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna

JAKARTA (IM) - Dua Kapal Kerang Republik Indonesia (KRI) menangkap Kapal Penangkap Ikan Asing (KPIA) berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Senin (10/1). Kedua kapal tersebut, yakni KRI Tjiptadi-381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol-383 yang merupakan BKO Gugus Tempur Laut Koarmada I.

Komandan KRI Tjiptadi (TPD)-381, Letkol Laut (P) Irwan mengatakan, penangkapan ini bermula ketika KRI yang dipimpinnya tengah menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut Natuna Utara. Pihaknya mendeteksi kontak radar yang kemudian didekati secara visual teridentifikasi sebagai kapal penangkap ikan asing. Mereka sedang menangkap ikan menggunakan pukat tarik.

"Tanggal 10 Januari pukul 22.05 WIB, posisi 43 NM barat Laut Pulau Laut, kami mendeteksi kontak tanpa lampu, kemudian kami dekati dan teridentifikasi sebagai sebuah kapal penangkap ikan Vietnam. Selanjutnya dilakukan prosedur pengejaran penangkapan dan penyelidikan," kata Irwan dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Dalam penangkapan, diketahui kapal tersebut berisi 12 Anak Buah Kapal (ABK)

dan 1 nahkoda. Seluruhnya langsung digiring ke Dermaga Sabang Mawang Lanal Ranai.

Sementara itu, KRI Tuanku Imam Bonjol-383 juga berhasil menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam. Mereka diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Mereka mendapati kontak radar pada posisi 05 01 00 U - 107 42 25 T atau 23 NM Barat Laut Pulau Laut.

Saat berhasil mendekat, akhirnya teridentifikasi secara visual dua buah kapal ikan asing bergandengan sedang menangkap ikan. "Selanjutnya dilaksanakan prosedur Jarkaplid," ungkap Komandan KRI IBL-383 Letkol Laut (P) Ivan Halim.

"Dari pemeriksaan awal ditemukan bukti-bukti bahwa dua kapal ikan itu memiliki tanda selar BTH 2121 TS dan BTH 2122 TS menangkap ikan secara ilegal di perairan ZEEI, Laut Natuna Utara. Diawaki masing-masing 4 orang dan 10 orang termasuk Nahkoda dan KKM," imbuhnya.

Dari ketiga kapal itu, berhasil ditemukan muatan ikan campur kurang dari 1 ton. Adapun muatan diduga telah dipindahkan ke kapal pengumpul. ● han

Mayjen Mulyo Aji Dilantik Menjadi Sesmenko Polhukam

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD melantik Sekretaris Kemmenko Polhukam yang baru, Mayjen TNI Mulyo Aji. Jenderal bintang dua itu menggantikan Letjen TNI Tri Soewandono yang memasuki masa purna tugas.

Mahfud pun mengaku yakin, dengan bekal pendidikan, pengalaman, dan pemahaman di berbagai bidang penugasan, Mulyo mampu menjalankan tugas sebagai Sesmenko Polhukam dengan sebaik-baiknya.

"Atas nama pemerintah serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan ucapan selamat Kepada Mayjen TNI Mulyo Aji dan Ibu atas kepercayaan sekaligus amanah ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Kepada Tri Soewandono, Mahfud berharap tetap bisa melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara meski di wilayah pengabdian yang berbeda. Dirinya turut menghaturkan terima kasih kepada jenderal bintang 3 tersebut.

"Kepada Letjen TNI Tri Soewandono beserta Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan selama

mengemban tugas sebagai Sesmenko Polhukam," tuturnya.

Sekadar informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3/TPA Tahun 2022 tertanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemmenko Polhukam.

Mayjen Mulyo Aji sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Posisinya kini telah digantikan oleh Mayjen TNI Untung Budiharto.

Mulyo Aji mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton STTB Kompi Bantuan Yonif 411/Pandawa (1987). Kemudian menjadi Kepala Seksi 2/Ops Yonif 411/Pandawa, Komandan Kompi A Yonif 411/Pandawa, dan Komandan Kompi C Yonif 411/Pandawa.

Beberapa tahun kemudian, suami dari Indah Wahyu Ningrum ini mulai dipercaya memimpin wilayah setelah diangkat Komandan Kodim 0824/Jember. Lalu Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) Iskandar Muda (2010-2011), Danrem 074/Warastatama (2012-2014). ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



TERAWAN AGUS PUTRANTO MENERIMA GELAR PROFESOR KEHORMATAN

Mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat prosesi Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1). Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kedokteran Militer, Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan.

Menko PMK: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Perhatian Serius Presiden Jokowi

Menko PMA Muhadjir Effendy berharap hukuman terhadap pelaku kejahatan harus semaksimal mungkin atau seberat-beratnya. Apalagi dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak.

JAKARTA (IM) - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Muhadjir menanggapi persoalan pasal berlapis menjerat Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santiriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Mulai dari hukuman mati bakal dijatuhkan majelis hakim kepada guru mengaji ini. Ia mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang cermat, konkrit, secara profesional, yang terpenting adalah bagaimana supaya bisa memberikan efek jera," kata Menko Muhadjir di Jakarta (12/1).

Ia menjelaskan, penanganan korban kekerasan seksual menjadi prioritas persoalan pemerintah termasuk presiden Jokowi. Hal ini berkaitan dengan masa depan dan dalam jangka panjang untuk memulihkan trauma psikososialnya.

"Kasus kekerasan seksual ini merupakan menjadi perhatian yang sangat serius bapak presiden, karena bapak presiden biasanya kalau isu tidak terlalu serius beliau limpahkan kepada pembantu beliau, Kalau ini bapak presiden sendiri yang memberikan pernyataan secara keras berarti ini memang persoalan yang serius," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya. Terlebih jika dampak

yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut.

Selain itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi menanggapi persoalan Pasal berlapis menjerat Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santiriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Mulai dari hukuman mati bakal dijatuhkan majelis hakim kepada guru mengaji ini.

Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemmenko PMK) saat menggelar rapat tingkat menteri (RIM) di Jakarta (12/1).

"Iya tuntutan saya kira menganut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam peraturan KUHP, terkait pemberatan terhadap hukuman saya kira itu sudah sesuai dengan yang

ditetapkan oleh penegak hukum," kata Wamenag di Jakarta (12/1).

Ia memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum terkait pasal yang menjerat pelaku pemerkosaan santiri yang terancam di bebiri.

"Kemeng memberikan dukungan penuh terhadap penegak hukum atas tuntutan terhadap tersangka. Ini merupakan satu bentuk tuntutan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kami yakin penegak hukum bekerja secara profesional secara transparan dan akurat akuntabel," kata Zainut.

Ia berharap tuntutan ini bisa memberikan efek jera kepada orang-orang yang akan melakukan tindakan kekerasan seksual.

"Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bersih harus terhindar dari perilaku perilaku yang tidak baik, tindak asusila," ujarnya. ● han



PBNU UMUMKAN JAJARAN PENGURUS BARU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (kanan) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027.

Pengacara Maskur Husain Divonis 9 Tahun Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara

JAKARTA (IM) - Pengacara Maskur Husain dihukum 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (12/1). Selain itu, Maskur juga dikenakan denda pidana sebesar Rp500 juta.

Majelis hakim dalam putusannya menyebut, Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena bersama-sama dengan eks penyidik KPK Stepanus Robin menerima suap senilai Rp11,538 miliar dari sejumlah orang. Uang suap yang diterimanya itu untuk mengamankan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu uang suap yang diterima Maskur dari mantan Wakil Ketua DPR DPR Aziz Syamsuddin.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Djuyanto di Pengadilan

Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (12/1).

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti atas kejahatannya sebesar Rp8.702.500.000 dan US\$36 ribu. Uang tersebut mesti diganti paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama tiga tahun," kata Hakim.

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Maskur dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan.

Hakim menjelaskan, dalam memutus vonis Maskur, ada beberapa hal pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan. Hal yang mem-

beratkan perbuatan Maskur sebagai aparat hukum merusak tatanan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi," kata Hakim.

Sementara hal yang meringankan, Maskur belum pernah dihukum, sopan, serta masih mempunyai tanggungan keluarga.

Maskur terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. ● mei

PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan tindakan konversi saham yang dilaksanakan dalam PT. Dunia Moka Indonesia telah selesai dilaksanakan dan penerbitan saham baru atas konversi tersebut diambil bagian oleh Unworld Solutions PTE. LTD.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Modal.

Glianyar, 13 Januari 2022
PT. Dunia Moka Indonesia
Aleksandar Potnjanj
Direktur

PENGUMUMAN

Proses likuidasi PT. NORTHSTAR BUSINESS CONSULTING PARTNERS (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) telah selesai dilaksanakan, pemegang saham Perseroan telah menerima Laporan Pertanggungjawaban Likuidator dan memberikan penutupan dan pembebasan kepada likuidator berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Desember 2021.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Januari 2022

Likuidator
PT. NORTHSTAR BUSINESS CONSULTING PARTNERS
(dalam likuidasi)

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut.

- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Awal dan selanjutnya Unit Penyerahan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per Unit Penyerahan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per Unit Penyerahan";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyerahan dari semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi";
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyerahan dari semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)"; dan
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi dari semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rencana perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED GROWTH FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA reksa dana

Jakarta, 13 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PREDIKSI PUNCAK PENYEBARAN OMICRON
Warga mengenakan masker saat melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (12/1). Kemenkes memprediksi puncak penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron akan terjadi pada awal atau pertengahan Februari 2022.